

KAUSALITAS INFLASI DAN PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA PERIODE 1965-2013

Andrian Dolfriandra Huruta

Universitas Kristen Satya Wacana

Email:andrian.huruta@staff.uksw.edu

Abstract

Macroeconomic deals with the economy as a whole. It examines the behavior of economic aggregates such as gross domestic product, gross domestic product per capita, consumption, investment, inflation, exchange rate, money supply, export, import, unemployment, debt, interest rates, and so forth. Aggregate behavior refers to the behavior of households, companies and countries. This study aims to analyze causality of inflation and economic growth in Indonesia. Study of inflation and economic growth has been done by researchers such as Hartini and Utomo (2004), Setyawati (2006), Maqrobi and Pujiati (2011), Mamo (2012) and Acyuninda (2012), Miskhin (2001), Bofinger (2001), Hervino (2011), Fujiwara (2013), Tutino and Zarazaga (2014), Jahan and Papageorgiou (2014), Trisdian et al. (2014), Christiano and Fitzgerald (2000), Daniel (2007) and Darise (2009) which is see inflation as a monetary phenomenon and fiscal. This study uses secondary data especially the data of Indonesia current macroeconomic such as economic growth and inflation which published by the World Bank. These data are time series data (time series) from 1965 - 2013. Methodically, this study using Granger causality test to determine the causality of inflation and economic growth. The results shows that there is no causality between inflation and economic growth.

Keywords: *Economic Growth, Inflation, Granger Causality*

Abstrak

Makro ekonomi mengkaji tentang kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Ia mengkaji perilaku agregat ekonomi seperti produk domestik bruto, produk domestik bruto per kapita, konsumsi, investasi, inflasi, nilai tukar, jumlah uang beredar, ekspor, impor, pengangguran, utang, tingkat suku bunga, dan sebagainya. Perilaku agregat mengacu kepada perilaku rumah tangga, perusahaan dan negara. Studi ini bertujuan untuk menganalisis kausalitas inflasi dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Studi tentang inflasi dan pertumbuhan ekonomi telah dilakukan oleh para peneliti seperti Hartini dan Utomo (2004), Setyawati (2006), Maqrobi dan Pujiati (2011), Mamo (2012) dan Acyuninda (2012), Miskhin (2001), Bofinger (2001), Hervino (2011), Fujiwara (2013), Tutino dan Zarazaga (2014), Jahan dan Papageorgiou (2014), Trisdian et al. (2014), Christiano dan Fitzgerald (2000), Daniel (2007) dan Darise (2009) yang

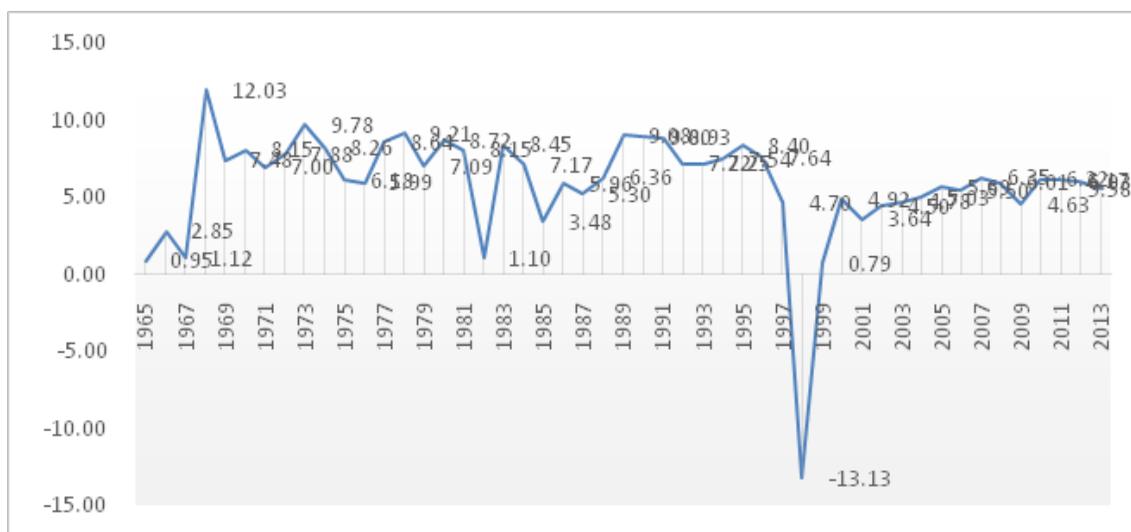
melihat inflasi sebagai fenomena moneter maupun fiskal. Jenis data yang digunakan dalam tulisan ini adalah data sekunder. Data sekunder yang dimaksud merupakan data-data ekonomi makro Indonesia terkini seperti pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang dipublikasi oleh Bank Dunia. Data-data tersebut merupakan data runtun waktu (*time series*) dari tahun 1965 - 2013. Secara metodis, studi ini menggunakan uji kausalitas Granger untuk mengetahui kausalitas inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada kausalitas antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Kata Kunci: Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, Kausalitas Granger

1. Pendahuluan

Indonesia cukup berpengalaman dalam menghadapi masa-masa sulit seperti pada masa ekonomi liberal (1950-1957), masa ekonomi terpimpin (1959-1965), masa transisi (1965-1969), masa orde baru dasawarsa 1970 (masa kemajuan dan modernisasi), masa orde baru dasawarsa 1980 (masa lesu dan sulit), masa orde baru dasawarsa 1990 (menghadapi tantangan global), masa krisis ekonomi 1997, masa pasca krisis ekonomi atau masa pemulihan (2000), sampai saat ini (era reformasi) (Nanga 2010).

Data dari bank dunia menunjukkan bahwa selama periode 1965 hingga 2013 *trend* dari pertumbuhan ekonomi Indonesia terus mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Berikut merupakan gambaran *trend* pertumbuhan ekonomi Indonesia periode 1965-2013.



Gambar 1.
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode 1965-2013
 (Sumber: World Bank, diolah penulis)

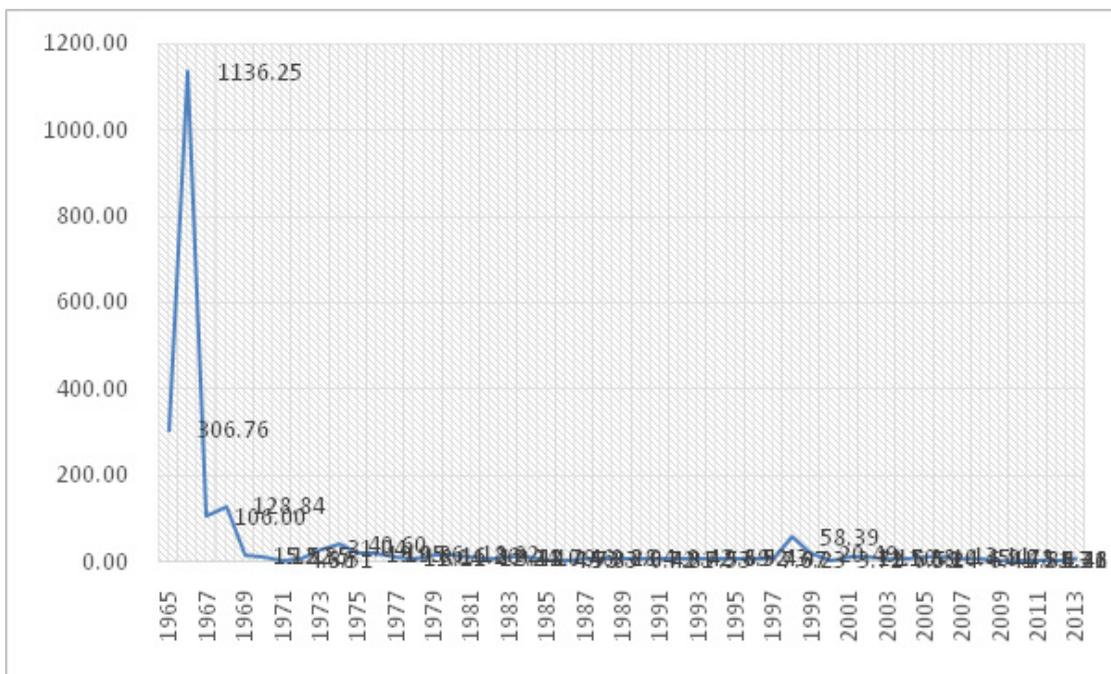
Meskipun demikian, ternyata ada suatu fenomena *extra ordinary* yang dihadapi oleh Indonesia pada dasawarsa 1990 yaitu krisis ekonomi 1997. Krisis ekonomi yang terjadi pada

Juli 1997, berawal dari kebijakan devaluasi terhadap Bath (mata uang Thailand), yang kemudian melebar ke seluruh wilayah Asia Timur dan Tenggara, termasuk Indonesia. Sejak saat itu, kurs rupiah terhadap dollar AS mulai menunjukkan tanda-tanda melemah, lesunya pasar modal, sistem perbankan yang semakin memburuk, pertumbuhan ekonomi yang merosot menjadi -13,13persen(1998) dan berbagai persoalan pelik lainnya.

Belajar dari kondisi tersebut, maka pemerintah Republik Indonesia dan *International Monetary Fund* (IMF) meluncurkan program penyelamatan ekonomi lewat kerangka kebijakan ekonomi secara menyeluruh seperti (1) stabilisasi ekonomi makro; (2) restrukturisasi perbankan; (3) restrukturisasi utang swasta; (4) proteksi penduduk miskin dan (5) reformasi struktural untuk memperbaiki daya saing dan pemerintahan.

Upaya tersebut cukup berhasil untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi ke arah yang positif. Walaupun masih terdapat berbagai kekurangan yang membutuhkan tindakan pembenahan. Kemudian, memasuki tahun 2000 oleh sebagian besar penduduk Indonesia menyebutnya sebagai masa pasca krisis, di mana pertumbuhan ekonomi kembali mengalami *recovery*. Pada tahun 2008 terjadi krisis ekonomi di Eropa, namun hal tersebut tidak membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia merosot.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 1998 yang negatif mengakibatkan terjadinya stagflasi yang mencerminkan suatu kondisi di mana saat pertumbuhan ekonomi merosot, maka akan disertai dengan tingkat pengangguran yang sangat tinggi. Persoalan stagflasi juga akan disertai tingkat inflasi yang sangat tinggi. Berikut merupakan gambaran *trend* tingkat inflasi Indonesia periode 1965-2013.



Gambar 2.
Tingkat Inflasi Indonesia Periode 1965-2013
 (Sumber: *World Bank*, diolah penulis)

Pada masa transisi (1965-1969) Indonesia berupaya menata kembali sistem ekonomi (organisasi ekonomi) lewat penataan kembali terhadap sistem ekonomi yang kacau di masa lampau. Hal ini tercermin dengan jelas lewat adanya *shock* yang terjadi pada tahun 1966, di mana inflasi mencapai 1.136,25 persen. Inflasi yang sangat parah ini disebabkan oleh berbagai kekacauan yang terjadi pada era orde lama seperti dampak negatif dari kebijakan sanering yang mengakibatkan bank-bank mengalami kesulitan likuiditas dan terjadi depresiasi nilai tukar rupiah, adanya dualisme ekonomi di dalam struktur ekonomi, sistem ekonomi yang terlalu liberal, pengejawantahan sistem pemerintahan parlementer (8 kabinet berkuasa selama 7 tahun), kualitas sumber daya manusia yang rendah dan pertumbuhan penduduk 2,2 – 2,5 persen per tahun, kebijakan ekonomi yang sangat lemah karena aparat pemerintahan yang kurang berpengalaman, kabinet yang sering berganti-ganti karena tidak ada kontinuitas dan konsistensi kebijakan, rencana pembangunan lima tahun (repelita) Sumitro yang tidak berjalan karena kurang mendapatkan dukungan politik, kepemimpinan nasionalis yang beralih ke kelompok radikal (sosialis), kabinet Juanda yang hanya dijalankan hingga Juli 1959, dikeluarkannya dekrit presiden Soekarno untuk kembali ke undang-undang dasar 1945, diperkenalkannya sosialis ala Indonesia, pasar yang hampir tidak berfungsi, ruang gerak swasta yang sangat dibatasi, adanya politik konfrontasi (politik perang), menjalankan sistem ekonomi tertutup (isolasionistis) (keluar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, tidak menghendaki penanaman modal asing, tidak menginginkan bantuan dan pinjaman luar negeri), struktur ekonomi buruk yang ditandai dengan stagnasi produksi (impor beras yang meningkat tajam dan sektor industri manufaktur yang bekerja di bawah kapasitas), terjadi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, ketidakstabilan neraca pembayaran (TB defisit), beban utang luar negeri yang meningkat (US\$ 2,358 milyar) dan pengangguran yang meningkat (5 – 6 persen per tahun). Dalam kondisi krisis tersebut, pemerintah Indonesia mengalami *trade-off* (dilema). Artinya jika pemerintah melakukan kebijakan anti inflasi (kontraksi fiskal atau moneter), maka hal ini tentu akan mengganggu upaya untuk mengatasi stagnasi atau pengangguran yang membutuhkan produk kebijakan seperti ekspansi fiskal atau moneter (Nanga, 2010).

Studi tentang kausalitas inflasi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia telah banyak dilakukan oleh para peneliti sebagaimana dilakukan oleh Hartini dan Utomo (2004), Setyawati (2006), Maqrobi dan Pujiati (2011), Mamo (2012) dan Acyuninda (2012) yang menyebutkan terdapat hubungan kausalitas inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Namun, berbeda dengan hasil studi Mishkin (2001), Bofinger (2001), Hervino (2011), Fujiwara (2013), Tutino dan Zarazaga (2014), Jahan dan Papageorgiou (2014), Trisdian et al. (2014) yang menyebut inflasi masih merupakan fenomena moneter yang oleh aliran moneter disebut sebagai *long-run monetary neutrality* dan juga hasil studi Christiano dan Fitzgerald (2000), Daniel (2007) dan Darise (2009) yang menyebut inflasi tidak hanya semata-mata merupakan fenomena moneter, melainkan juga merupakan fenomena fiskal yang sering disebut dengan *fiscal theory of the price level* (teori fiskal tentang tingkat harga). Dengan demikian, studi ini sebenarnya bertitik tolak dari dari berbagai studi yang telah disebutkan sebelumnya. Namun, karena adanya temuan yang sangat bervariasi, maka penulis merasa studi ini perlu dilakukan untuk mendapatkan gambaran

yang komprehensif mengenai kausalitas inflasi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia periode 1965 – 2013.

2. Hubungan Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi

Jumlah uang beredar bukanlah satu-satunya faktor penentu tingkat harga. Keynes berpendapat bahwa sebenarnya ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi tingkat harga yaitu konsumsi rumah tangga (C), investasi (I), pengeluaran pemerintah (G), dan pajak (T). Inflasi terjadi karena masyarakat ingin hidup di luar batas kemampuan ekonomisnya, sehingga menyebabkan permintaan agregat melebihi jumlah barang-barang yang tersedia penawaran agregat. Akibatnya terjadi celah inflasi (*inflationary gap*). Keterbatasan penawaran agregat terjadi karena dalam jangka pendek kapasitas produksi tidak dapat ditingkatkan untuk mengimbangi kenaikan permintaan agregat.

Keynes juga berpendapat bahwa kuantitas uang tidak berpengaruh terhadap tingkat permintaan total, karena suatu perekonomian dapat mengalami inflasi, walaupun tingkat kuantitas uang tetap konstan. Jika uang beredar bertambah, maka harga akan naik. Kenaikan harga ini akan menyebabkan bertambahnya permintaan uang untuk transaksi, yang selanjutnya akan diikuti dengan kenaikan suku bunga. Hal ini akan berpengaruh terhadap melambatnya atau bahkan berkurangnya pertambahan permintaan untuk investasi dan akan memperlemah tekanan inflasi. Menurut Keynes, inflasi permintaan yang sangat penting adalah yang ditimbulkan oleh pengeluaran pemerintah, terutama yang berkaitan dengan peperangan, program investasi yang besar-besaran dalam modal sosial (Nanga, 2001). Ketika inflasi mengalami peningkatan maka akan menyebabkan turunnya tingkat investasi. Hal ini dikarenakan kenaikan inflasi akan mendorong naiknya tingkat suku bunga, kenaikan suku bunga tersebut pada gilirannya akan mendesak investasi sehingga menyebabkan investasi mengalami penurunan. Turunnya investasi, berarti pula menurunnya kapasitas produksi. Ketika kapasitas produksi mengalami penurunan, hal tersebut selanjutnya berdampak pada menurunnya (melambatnya) penyerapan tenaga kerja. Menurunnya penyerapan tenaga kerja di satu pihak, sementara di pihak lain, terjadi penambahan tenaga kerja baru setiap tahunnya, akan berdampak pada meningkatnya tingkat pengangguran. Saat pengangguran meningkat maka pendapatan masyarakat menjadi berkurang, menurunnya pendapatan masyarakat selanjutnya berdampak pada berkurangnya konsumsi masyarakat. Menurunnya konsumsi masyarakat berarti pula menurunnya permintaan agregat. Ketika permintaan agregat menurun, maka akan menyebabkan laju pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan. Apabila laju pertumbuhan ekonomi menurun, maka pendapatan negara ikut mengalami penurunan. Menurunnya pendapatan negara, selanjutnya akan menyebabkan anggaran belanjanya juga ikut menurun. Ketika pendanaan untuk anggaran belanja mengalami penurunan, namun di sisi lain pemerintah ingin mempertahankan anggaran belanja yang tinggi untuk memacu pertumbuhan ekonomi, maka pemerintah akan berusaha mencari pendanaan baru. Misalnya: mencetak uang, sehingga berdampak pada meningkatnya jumlah uang beredar. Pada saat jumlah uang beredar meningkat, maka akan mendorong meningkatnya laju inflasi. Siklus ini akan terus berlanjut seperti sebuah *life cycle*.

3. Metode Penelitian

3.1. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam tulisan ini adalah data sekunder. Data sekunder yang dimaksud merupakan data-data ekonomi makro Indonesia terkini seperti pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang dipublikasi oleh *World Bank* (Bank Dunia). Data-data tersebut merupakan data runtun waktu (*time series*) dari tahun 1965 - 2013.

3.2. Teknik Analisis Data

Studi ini menggunakan analisis runtun waktu kausalitas *Granger*. Alasan utama menggunakan uji kausalitas *Granger* adalah ketidakmampuan analisis regresi untuk mengungkapkan ada atau tidaknya hubungan kausalitas meskipun regresi diyakini dapat mengukur derajat hubungan statistik antar variabel.

3.3. Uji Stasioneritas

Analisis runtun waktu butuh asumsi stasioneritas data. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa sifat-sifat statistik di masa yang akan datang mampu diramal berdasarkan data historis. Pengujian stasioneritas dimaksudkan untuk mengamati apakah data runtun waktu mengandung akar unit (*unit root*) atau untuk mengamati apakah terdapat komponen *trend* berupa *random walk* dalam data. Pengujian yang digunakan dalam studi ini adalah uji *DickeyFuller* ($k=0$) dan *Augmented Dickey Fuller* ($k>0$). Uji ini sering digunakan untuk melihat apakah terdapat *unit root* di dalam model atau tidak (baca: *integrated*). Ada tiga skenario yang diajukan dalam pengujian ini yaitu $I(0)$ yang berarti data stasioner pada derajat level, $I(1)$ yang berarti data stasioner pada diferensi orde 1 dan $I(2)$ yang berarti data stasioner pada diferensi orde 2. Pengujian ini dilakukan untuk menguji hipotesis $H_0: \rho = 0$ (terdapat *unit root*) dan $H_a: \rho \neq 0$ (tidak terdapat *unit root*) pada persamaan regresi berikut (Rosadi 2012 : 41-42).

$$\Delta Y_t = \alpha + \delta_t + \rho Y_{t-1} + \sum_{j=1}^k \phi_j + \Delta Y_{t-j} + e_t \dots\dots\dots(1)$$

Dengan $\Delta Y_t = Y_t - Y_{t-1}$ dan $\rho = a - 1 \dots\dots\dots(2)$

3.4. Uji Panjang Lag

Impak dari suatu kebijakan publik yang berkaitan dengan ekonomi (lihat: fiskal maupun moneter) tidak dapat dirasakan secara spontan. Akan tetapi, dapat terlihat dengan jelas pada rentang waktu (*lag*) tertentu. Penentuan panjang *lag* yang optimal dimaksudkan untuk mengetahui berapa banyak *lag* yang akan digunakan dalam estimasi, serta untuk melihat apakah model tersebut *fit* (cocok) dengan data aktual. Salah satu cara untuk menentukan panjang *lag* yang optimal adalah dengan melihat nilai *Akaike Information Criteria* dan *Schwarz Information*

*Criteria*¹. Panjang *lag* yang terpilih berdasarkan kriteria tersebut, digunakan untuk pengujian *kausalitas Granger*.

3.5. Uji Kausalitas Granger

Dalam kasus model regresi tertentu, sulit untuk dilihat variabel mana yang menjadi penyebab variabel lain. Jika menggunakan data runtun waktu (*time series*) maka konsep kausalitas dapat diterangkan dengan cara berbeda karena pada hakikatnya waktu tidak dapat berjalan mundur. Jika suatu kejadian A terjadi sebelum kejadian B, maka (mungkin) A menyebabkan B, sehingga sifat seperti ini dapat dijelaskan dengan *Granger causality* (Rosadi 2012 : 211).

$$X_t = \sum_{i=1}^m a_i X_{t-1} + \sum_{j=1}^n b_j Y_{t-1} + \mu_t \dots\dots\dots(3)$$

$$Y_t = \sum_{i=1}^r c_i X_{t-1} + \sum_{j=1}^s d_j Y_{t-1} + V_t \dots\dots\dots(4)$$

Dimana, X_t adalah pertumbuhan ekonomi dan Y_t adalah inflasi, sedangkan μ_t dan v_t adalah *error terms* yang diasumsikan tidak mengandung korelasi serial dan $m = n = r = s$.

Kemudian, pada uji kausalitas Granger ada empat hasil yang (mungkin) diperoleh yaitu:

1. Jika $\sum a_j \neq 0$ dan $\sum b_j = 0$, maka terdapat kausalitas satu arah dari pertumbuhan ekonomi ke inflasi.

$$\sum_{j=1}^m a_j \neq 0 \text{ dan } \sum_{j=1}^m \delta_j = 0 \dots\dots\dots(5)$$

2. Jika $\sum a_j = 0$ dan $\sum b_j \neq 0$, maka terdapat kausalitas satu arah dari inflasi ke pertumbuhan ekonomi.

$$\sum_{j=1}^m a_j = 0 \text{ dan } \sum_{j=1}^m \delta_j \neq 0 \dots\dots\dots(6)$$

3. Jika $\sum a_j = 0$ dan $\sum b_j = 0$, maka tidak terdapat hubungan kausalitas antara pertumbuhan ekonomi dan inflasi.

$$\sum_{j=1}^m a_j = 0 \text{ dan } \sum_{j=1}^m \delta_j = 0 \dots\dots\dots(7)$$

¹ Memilih nilai AIC dan SIC yang paling kecil

4. Jika $\sum_{aj} \neq 0$ dan $\sum_{bj} \neq 0$, maka terdapat kausalitas dua arah antara pertumbuhan ekonomi dan inflasi.

$$\sum_{j=1}^m \alpha_i \neq 0 \text{ dan } \sum_{j=1}^m \delta_j \neq 0 \dots\dots\dots(8)$$

Adanya hubungan sebab-akibat ditandai dengan nilai probabilitas yang lebih kecil dari pada alpha 0,05 (5 persen), sehingga hipotesis null (Ho) akan ditolak yang berarti suatu variabel akan menyebabkan variabel lain.

4. Hasil

4.1. Hasil Uji Stasioneritas Data Runtun Waktu

Di dalam analisis runtun waktu, asumsi stasioneritas dari data merupakan sifat yang paling penting. Pada model stasioner, sifat-sifat statistik di masa yang akan datang dapat diramalkan berdasarkan data historis yang telah terjadi di masa lalu (Rosadi 2012 : 38). Sebelum dilakukan estimasi terhadap model, maka perlu dipastikan jika seluruh variabel seperti pertumbuhan ekonomi dan inflasi stasioner pada derajat yang sama. Berikut merupakan hasil uji stasioneritas dengan menggunakan metode Augmented Dickey-Fuller (ADF) seperti dirangkum pada tabel berikut.

Tabel 1
Hasil Uji Stasioneritas

No.	Variabel	Derajat Integrasi	Statistik ADF	Nilai Kritis 5%	Kesimpulan
1	<i>Growth</i>	Level	-2.100572	-1.947816	I(0)
2	<i>Inflation</i>	Level	-4.970707	-1.947816	I(0)

Sumber: Data sekunder, diolah (2016)

Tabel 1 menunjukkan bahwa variabel *Growth* dan *Inflation* telah stasioner pada derajat integrasi level [I(0)]. Artinya data tersebut sudah tidak mengandung *trend* atau akar unit.

4.2. Hasil Uji Panjang Lag dan Kausalitas Granger

Hasil penentuan panjang *lag* yang optimum berdasarkan SIC adalah 1 ($k = 1$), seperti yang dirangkum dalam tabel berikut.

Tabel 2
Uji Panjang Lag

Lag	LogL	LR	FPE	AIC	SC	HQ
0	-274.4472	NA	982.4454	12.56578	12.64688	12.59586
1	-265.0728	17.47062*	769.8213*	12.32149*	12.56479*	12.41172*
2	-264.0597	1.795821	883.1349	12.45726	12.86276	12.60764
3	-263.7250	0.562940	1046.871	12.62386	13.19156	12.83439
4	-262.5360	1.891617	1197.017	12.75164	13.48153	13.02232
5	-259.7475	4.182737	1277.425	12.80670	13.69880	13.13754

Sumber: Data primer, diolah (2016)

Lag inilah ($k = 1$) akan menjadi dasar bagi penulis untuk melakukan uji kausalitas *Granger* sebagaimana yang terangkum dalam tabel berikut.

Tabel 3
Granger Causality

Pairwise Granger Causality Tests			
Date: 07/11/16 Time: 15:49			
Sample: 1965 2013			
Lags: 1			
Null Hypothesis:	Obs	F-Statistic	Prob.
Inflation does not Granger Cause Growth	48	1.09027	0.3020
Growth does not Granger Cause Inflation		1.53523	0.2218

Sumber: Data sekunder, diolah (2016)

Hasil pengujian kausalitas *Granger* menunjukkan bahwa tidak adanya hubungan kausalitas dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia, yang dibuktikan oleh nilai probabilitas yang berada di atas 5 persen (> 5 persen).

4.3. Refleksi Temuan Penelitian

Hasil uji kausalitas *Granger* menunjukkan bahwa pada periode 1965–2013 tidak terdapat hubungan kausalitas inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Temuan ini juga tidak sejalan dengan teori Keynes dan tidak sejalan dengan studi sebagaimana yang dilakukan oleh Setyawati (2006), Hartini dan Utomo (2004), Maqrobi dan Pujiati (2011), Mamo (2012) dan Acyuninda (2012) yang menyebut inflasi memiliki hubungan kausalitas dengan pertumbuhan ekonomi.

Kondisi ini diduga disebabkan oleh *shock* inflasi yang terjadi pada tahun 1966, serta krisis yang terjadi pada 1998 yang mengakibatkan Indonesia hampir “kehilangan pijakan” dalam kancah perdagangan internasional, masyarakat kehilangan kepercayaan pada sektor perbankan, ekspor Indonesia terhambat oleh kurangnya biaya untuk impor bahan bakudan banyak pelanggan asing membatalkan pesannya karena kurang percaya bahwa perusahaan Indonesia akan mampu memenuhi permintaannya.

Kondisi perekonomian global yang masih mengalami tekanan akibat krisis menghadapkan perekonomian Indonesia pada sejumlah tantangan yang tidak ringan selama tahun 2009. Tantangan itu cukup mengemuka pada awal tahun 2009, sebagai akibat masih kuatnya dampak krisis perekonomian global yang mencapai puncaknya pada triwulan IV 2008. Ketidakpastian yang terkait dengan sampai seberapa dalam kontraksi global dan sampai seberapa cepat pemulihan ekonomi global akan terjadi, bukan saja menyebabkan tingginya risiko di sektor keuangan, tetapi juga berdampak negatif pada kegiatan ekonomi di sektor riil domestik. Kondisi tersebut mengakibatkan stabilitas moneter dan sistem keuangan pada triwulan I 2009 masih mengalami tekanan berat, sementara pertumbuhan ekonomi juga dalam *trend* menurun akibat kontraksi ekspor barang dan jasa yang cukup dalam. Kondisi tersebut menurunkan kepercayaan pelaku ekonomi di sektor keuangan dan sektor riil, serta berpotensi menurunkan berbagai kinerja positif yang telah dicapai dalam beberapa tahun sebelumnya.

Menghadapi tantangan tersebut, Bank Indonesia dan pemerintah menempuh sejumlah kebijakan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, serta mencegah turunnya pertumbuhan ekonomi yang lebih dalam melalui kebijakan stimulus moneter dan fiskal. Berbagai kebijakan yang ditempuh pada tahun 2009 pada dasarnya masih merupakan lanjutan dari serangkaian kebijakan yang telah ditempuh Bank Indonesia dan Pemerintah pada triwulan IV 2008. Serangkaian kebijakan yang ditempuh tersebut tidak saja berhasil menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, tetapi juga memperkuat daya tahan perekonomian domestik, sehingga kegiatan ekonomi dapat kembali membaik sejak triwulan II 2009. Keberhasilan tersebut juga tidak terlepas dari kebijakan yang secara sistematis telah ditempuh untuk memperkuat fundamental ekonomi dan keuangan pascakrisis 1997/1998. Secara umum, perekonomian Indonesia tahun 2009 telah mampu melewati tahun penuh tantangan tersebut dengan capaian yang cukup baik. Meskipun melambat dibandingkan dengan tahun 2008, pertumbuhan ekonomi tahun 2009 dapat mencapai 4,5 persen, tertinggi ketiga di dunia setelah China dan India. Perlambatan pertumbuhan ekonomi yang lebih besar di tengah kontraksi perekonomian global dapat dihindari, karena struktur ekonomi yang banyak didorong oleh permintaan domestik. Setelah mengalami tekanan berat pada triwulan I 2009, stabilitas pasar keuangan dan makroekonomi juga semakin membaik sampai dengan akhir tahun 2009. Hal itu tercermin pada berbagai indikator di sektor keuangan seperti *Currency Default Swap* (CDS), Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), imbal hasil (*yield*) SUN, dan nilai tukar yang membaik. Sementara itu, inflasi juga tercatat rendah 2,78 persen, terendah dalam satu dekade terakhir.

Berbagai capaian positif yang mampu diraih perekonomian Indonesia pada 2009 telah semakin menguatkan optimisme akan berlanjutnya proses perbaikan kondisi perekonomian ke depan. Optimisme tersebut juga didukung oleh semakin membaiknya prospek pemulihan ekonomi global. Meskipun demikian, dinamika perekonomian ke depan masih dihadapkan pada sejumlah tantangan yang berpotensi menghambat akselerasi perbaikan ekonomi. Dari sisi eksternal, tantangan terutama berkaitan dengan dampak dari strategi mengakhiri langkah kebijakan yang ditempuh di masa krisis (*exit strategy*), yang antara lain berupa pelonggaran likuiditas dan ekspansi fiskal di negara maju. Tantangan eksternal juga berhubungan dengan

terjadinya kecenderungan polarisasi perdagangan dunia, serta masih berlangsungnya ketidakseimbangan dalam kinerja perekonomian global. Dari sisi domestik, tantangan berkaitan dengan beberapa permasalahan yang masih dapat mengganggu efektivitas kebijakan moneter, seperti masih cukup besarnya ekse likuiditas perbankan, masih besarnya peranan investasi portofolio dalam struktur aliran modal masuk, masih munculnya potensi penggelembungan harga aset di pasar keuangan, masih dangkalnya pasar keuangan, dan berbagai permasalahan struktural di sektor riil.

Kemudian belajar dari pengalaman tahun 2012, pada periode Januari-Oktober nilai impor mencapai 159,18 miliar dollar AS atau meningkat 9,35 persen jika dibandingkan dengan impor periode yang sama tahun sebelumnya. Data Badan Pusat Statistik juga mencatat bahwa ekspor Januari-Oktober 2012 mencapai 158,66 miliar dollar AS atau turun 6,22 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2011. Peningkatan impor periode tersebut disebabkan oleh kenaikan impor gas bumi sebesar 109,5 persen menjadi 2,4 miliar dollar AS dan lonjakan impor nonminyak dan gas bumi (migas) sebesar 11,1 persen menjadi 124,4 miliar dollar AS. Sebagian besar impor berasal dari negara-negara ASEAN (21,35 persen), China (19,23 persen), dan Jepang (15,54 persen).

Data neraca pembayaran Bank Indonesia juga menunjukkan bahwa neraca perdagangan migas masih negatif pada triwulan III-2012. Pada triwulan III-2012, defisit neraca perdagangan migas tercatat sebesar 1,0 miliar dollar AS, sedikit lebih rendah dari defisit 1,2 miliar dollar AS pada triwulan sebelumnya. Penyebabnya adalah konsumsi BBM bersubsidi yang naik sehingga impor minyak masih relatif tinggi, serta kondisi ekonomi eksternal dan sejumlah faktor internal membuat ekonomi Indonesia tahun 2013 masih belum pasti. Dari sisi eksternal, pelambatan ekonomi kawasan euro akan menurunkan permintaan dan harga komoditas. Dari sisi internal, keengganan pemerintah menekan subsidi bahan bakar minyak membuat pembangunan infrastruktur terhambat sehingga biaya logistik membengkak (Prasetyaningrum, 2013).

Penulis juga menduga bahwa inflasi masih merupakan fenomena moneter di Indonesia, sehingga inflasi di Indonesia dalam periode 1965-2013 tidak disebabkan oleh sektor riil seperti pertumbuhan ekonomi, melainkan disebabkan oleh sisi moneter seperti jumlah uang yang beredar sebagaimana dikemukakan oleh Mishkin (2001), Bofinger (2001), Hervino (2011), Fujiwara (2013), Tutino dan Zarazaga (2014), Jahan dan Papageorgiou (2014), Trisdian et al. (2015) dan dari sisi fiskal seperti utang pemerintah sebagaimana dikemukakan oleh Christiano dan Fitzgerald (2000), Daniel (2007) dan Darise (2009).

5. Kesimpulan dan Implikasi

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data ditemukan bahwa (1) panjang *lag* yang optimal adalah 1 ($k = 1$), (2) tidak adanya hubungan kausalitas inflasi dan pertumbuhan ekonomi diduga disebabkan oleh berbagai persoalan pelik yang terjadi saat peralihan rezim orde lama ke orde baru, masa krisis, pasca krisis dan atau masa *recovery* dan (3) diduga bahwa inflasi masih merupakan fenomena moneter di Indonesia.

5.1. Implikasi Kebijakan

Oleh karena tidak adanya kausalitas inflasi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia periode 1965-2013 makapemerintah dan atau pembuat kebijakan diharapkan untuk konsisten terhadap proses stabilisasi inflasi agar tingkat inflasi yang dicapai sesuai dengan target atau lebih rendah dari target inflasi sehingga tingkat pertumbuhan ekonomi dapat dijaga dan mengalami kenaikan secara terus menerus. Kemudian, mengurangi ketergantungan terhadap impor, mengurangi ketergantungan terhadap utang, mengatur mobilisasi dana domestik lewat instrumen pajak, kebijakan promosi ekspor dan sebagainya.

Daftar Pustaka

- Acyuninda, D, (2012). *Analisis Hubungan antara Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Menggunakan Pendekatan Kointegrasi dan Kausalitas Granger pada periode 2000-2012*, Universitas Indonesia.
- Bofinger, P, (2001). *Monetary Policy: Goals, Institutions, Strategies, and Instruments*, Oxford University Press Inc., New York.
- Christiano, L, J dan Fitzgerald, T, J, (2000). *Understanding the Fiscal Theory of the Price Level*, NBER Working Paper Series, Working Paper 7668.
- Daniel, B, C, (2007). *The Fiscal Theory of the Price Level, and Initial Government Debt*, Review of Economic Dynamics, Vol. 10, No. 2.
- Darise, N, (2009). *Pengelolaan Keuangan Daerah: Pedoman untuk Eksekutif dan Legislatif*, Indeks., Jakarta.
- Fujiwara, I, (2013). *Japanese Inflation: A Monetary or Fiscal Phenomenon?*, East Asia Forum.
- Hartini, D dan Utomo, Y, P, (2004). *Analisa Pengaruh Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dengan metode Final Prediction Error*, Surakarta: Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Hervino, A, D, (2011). *Volatilitas Inflasi di Indonesia: Fiskal atau Moneter?*, Finance and Banking Journal, Vol. 13, No. 1.
- Jahan, S dan Papageorgiou, C, (2014). *What is Monetarism?*, Finance and Development, Vol. 51, No. 1.
- Mamo, F, T, (2012). *Economic Growth and Inflation a Data Panel Analysis*. Thesis. Södertörns University. Department of social science.
- Maqrobi, S dan Pujati, A, (2011). *Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi: Uji Kausalitas*. Jurnal Dinamika – Keuangan dan Perbankan, Vol. 3, No. 1.
- Miskhin, F, S, (2001). *The Economics of Money, Banking, and Financial Markets, Sixth Edition*, Addiso Wesley Longman.
- Nanga, M, (2005). *Makro Ekonomi: Teori, Masalah dan Kebijakan*, Edisi Pertama. Jakarta: Rajawali Press.
- Nanga, M, (2010). *Perekonomian Indonesia*, Materi Kuliah, Sumba: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kristen Wira Wacana.

- Prasetyaningrum, P, (2013). *Situasi Perekonomian Indonesia*, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma.
- Rosadi, D, (2012). *Ekonometrika dan Analisis Runtun Waktu Terapan Dengan Eviews*, Yogyakarta: ANDI.
- Setyawati, Yunita. (2006). *Analisis Kausalitas Antara Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi (kasus perekonomian Indonesia tahun 1994.1-2003.4) Dengan Metode ECM*. Yogyakarta: Fakultas ekonomi UII.
- Trisdian, P, A., Pratomo, Y dan Saraswati, B, D, (2015). *Volatilitas Inflasi Daerah di Indonesia: Fenomena Moneter atau Fiskal?*, Kritis, Jurnal Studi Pembangunan Interdisipliner, Vol. XXIV, No. 1.
- Tutino, A dan Zarazaga, E, J, (2014). *Inflation is not always and Everywhere a Monetary Phenomenon*, *Economic Letter*, Vol. 9, No. 6.
- <http://databank.worldbank.org/ddp/home.do>. Diakses 26 Januari 2016.

